



# **RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH RENJA (PD) TAHUN 2026**

**BADAN PENGHUBUNG  
PROVINSI RIAU**

Jl. Otto Iskandardinata No. 107 Jakarta timur, Np tlp. 021-8198330  
Website : [badanpenghubung.riau.go.id](http://badanpenghubung.riau.go.id)



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

**PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 38 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026.

#### Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

#### Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH  
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
BAB V : PENUTUP

#### Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 November 2025

Plt. GUBERNUR RIAU,

TTD

S. F. HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

TTD

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 39

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**YAN DHARMADI, SH, MH**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19840326 200903 1 003



## DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Landasan Hukum.....	3
1.3    Maksud dan Tujuan.....	6
1.4    Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II</b> <b>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN</b> <b>2024</b> .....	<b>12</b>
2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penghubung Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Penghubung.....	12
2.2    Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Riau.....	18
2.2.1    Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung	18
2.2.2    Data-data Perkembangan Kegiatan.....	20
2.3    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Riau.....	21
2.3.1    Tingkat kinerja pelayanan Badan Penghubung Provinsi Riau dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan.....	20
2.3.2    Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam Menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Penghubung.....	23
2.3.3    Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional / Internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs ( <i>Sustainable Development Goals</i> ).....	26
2.3.4    Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Riau.....	26

2.3.5	Formulasi isu0isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.....	27
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	27
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	33
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	34
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	34
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penghubung Provinsi Riau.....	34
3.3	Program dan Kegiatan.....	35
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU.....	45
BAB V	PENUTUP.....	52

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi Riau s/d Tahun 2025 Provinsi Riau.....	12
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Riau.....	18
Tabel 2.3	Kondisi Asrama Mahasiswa Riau.....	19
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Provinsi Riau.....	28
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Provinsi Riau.....	33
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026.....	35
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 2026 dan Prakiraan Maju 2027.....	39
Tabel 4.1	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026.....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	2
Gambar 1.2	Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	3

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

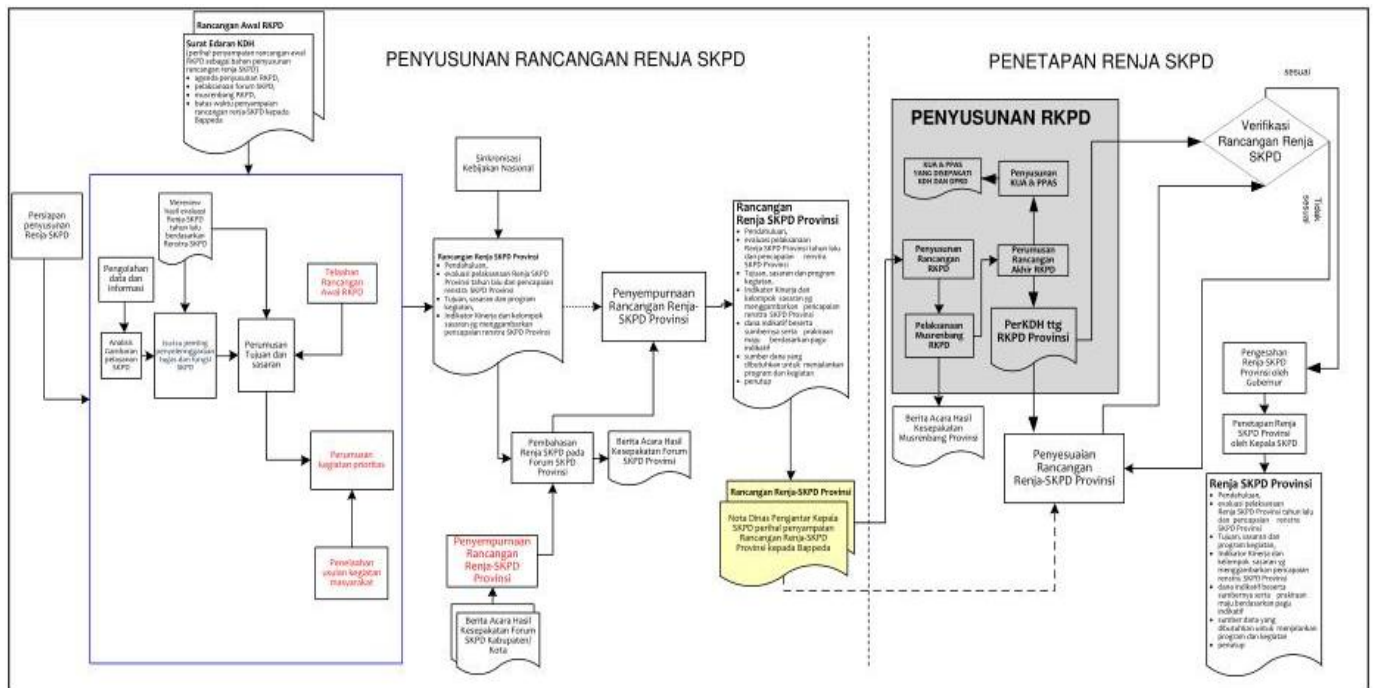
Rencana Kerja Perangkat Daerah ini juga merupakan sebuah dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

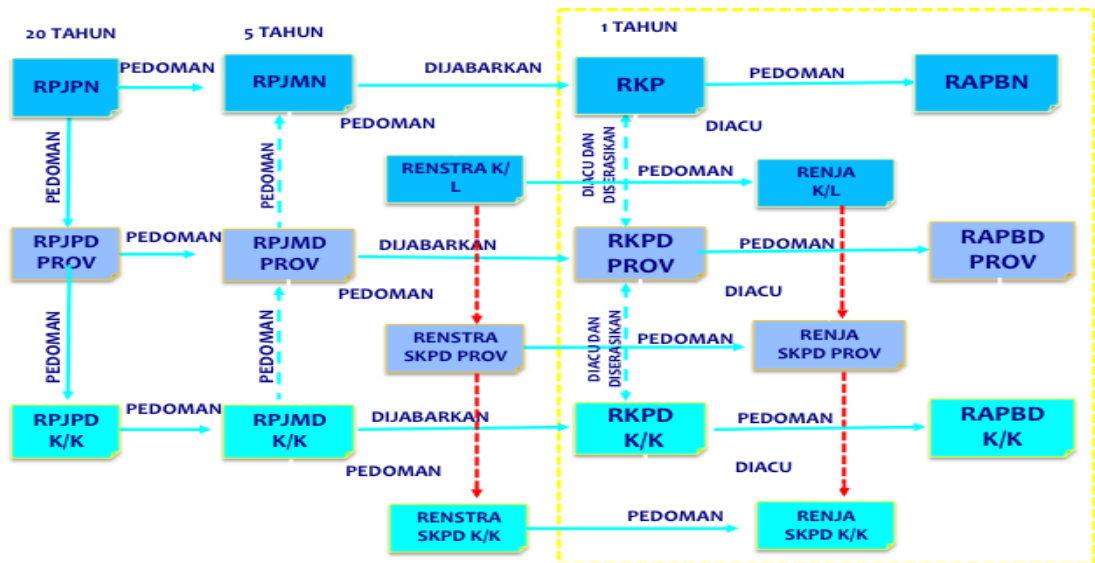
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD.
4. Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD.
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :



**Gambar 1.1**  
**Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dengan memperhatikan Renja K/L, selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan Renja Kabupaten/Kota terkait, keterkaitan dokumen-



dokumen tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**Gambar 1.2**  
**Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen**  
**Perencanaan Lainnya**

### 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nmr 194, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
15. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi

Daerah Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.

16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Riau;
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3);
20. Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 4);
21. Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 39);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja Badan Penghubung Provinsi Riau tahun 2026 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra melalui dokumen perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Penghubung Provinsi Riau tahun 2026 ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan Penghubung Provinsi Riau untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Badan Penghubung dan RPJMD Provinsi Riau di tahun 2026.
2. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di tahun 2026. yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan laporan kinerja

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Renja Perangkat Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dengan substansi bab sebagai berikut :

- 1.1. Latar Belakang, mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Rancangan Kerja Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3. Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

- 1.4. Sistematika Penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dengan substansi bab sebagai berikut :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah menguraikan realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, dan tabel T-C.29

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah menguraikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK dan lampiran table T-C.30.

- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah menguraikan tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*), Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD menguraikan Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda, lampiran tabel T-C.31.
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat menguraikan Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, lampiran tabel T-C.32.

Bab III Tujuan dan sasaran perangkat daerah memuat telahaan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, dan program dan kegiatan dengan subtansi bab sebagai berikut:

- 3.1. Telahaan terhadap kebijakan nasional menguraikan tentang penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah menguraikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan menguraikan faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, lampiran tabel T-C.33

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, diambil dari Sistem i-Planning pada pada tahapan final RKPD dan lampiran Renja SIPD

BAB V Penutup berisikan uraian penutup

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;

2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
3. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah, nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap Perangkat Daerah yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penghubung Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Penghubung**

Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Riau tahun 2026 merupakan penjabaran perencanaan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Riau tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

Evaluasi pelaksanaan Renja dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program/kegiatan atau kebijakan. Lebih lanjut evaluasi dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Penghubung Provinsi Riau tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Badan Penghubung Provinsi Riau sampai dengan tahun berjalan (2025) disajikan dalam format T-C.29 pada Tabel 2.1 berikut.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Provinsi Riau | 2026

Tabel 2.1  
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA  
PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU S/D TAHUN 2025  
PROVINSI RIAU

Perangkat Daerah : BADAN PENGHUBUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Penghubung Tahun 2025-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target Program dan Kegiatan (Renja Badan Penghubung Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Badan Penghubung Tahun 2024	Realisasi Renja Badan Penghubung Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH									
5 07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG									
5 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	0%	0%	0%	0,00%	100%	100%	50,00%
5 07 01 1 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	14 Dok	0	0	0	0,00%	7 Dok	7 Dok	50,00%
5 07 01 1 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dok	0	0	0	0,00%	7 Dok	7 Dok	50,00%
5 07 01 1 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	2 Dok	0	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Dok	1 Dok	50,00%
5 07 01 1 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	136 OB	0	70 OB	70 OB	100,00%	68 OB	68 OB	50,00%
5 07 01 1 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	4 Laporan	0	0	0	0,00%	2 Laporan	2 Laporan	50,00%
5 07 01 1 03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	0	0	0	0,00%	2 Laporan	2 Laporan	50,00%
5 07 01 1 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Kepegawaian yang dikelola	4 Jenis	0	0	0	0,00%	2 Jenis	2 Jenis	50,00%
5 07 01 1 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	136 Paket	0	0	0	0,00%	68 Jenis	68 Jenis	50,00%

Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Provinsi Riau | 2026

Perangkat Daerah : BADAN PENGHUBUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Penghubung Tahun 2025-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target Program dan Kegiatan (Renja Badan Penghubung Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Badan Penghubung Tahun 2024	Realisasi Renja Badan Penghubung Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 07 01 1 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 Orang	0	0	0	0,00%	10 Orang	10 Orang	50,00%
5 07 01 1 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi</b>	<b>16 Jenis</b>	<b>0</b>	<b>7 Jenis</b>	<b>7 Jenis</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 Jenis</b>	<b>8 Jenis</b>	<b>50,00%</b>
5 07 01 1 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	3 Paket	3 Paket	50,00%
5 07 01 1 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	12 Paket	3 Paket	2 Paket	67,00%	4 Paket	4 Paket	50,00%
5 07 01 1 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	4 Paket	4 Paket	50,00%
5 07 01 1 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	6 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	5 Paket	5 Paket	50,00%
5 07 01 1 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	3 Paket	2 Paket	2 Paket	100,00%	3 Paket	3 Paket	50,00%
5 07 01 1 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	50,00%
5 07 01 1 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	50,00%
5 07 01 1 06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	0	0	0	0,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	50,00%
5 07 01 1 07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</b>	<b>6 Jenis</b>	<b>0</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>50,00%</b>
5 07 01 1 07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	0	2 Paket	2 Paket	100,00%	5 Paket	5 Paket	50,00%

Perangkat Daerah : BADAN PENGHUBUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Penghubung Tahun 2025-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target Program dan Kegiatan (Renja Badan Penghubung Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Badan Penghubung Tahun 2024	Realisasi Renja Badan Penghubung Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 07 01 1 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	106 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	100,00%	50 Paket	50 Paket	50,00%
5 07 01 1 07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0	6 Unit	3 Unit	50,00%	5 Unit	5 Unit	50,00%
5 07 01 1 08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi</b>	<b>6 Jenis</b>	<b>0</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>50,00%</b>
5 07 01 1 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	50,00%
5 07 01 1 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	50,00%
5 07 01 1 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	50,00%
5 07 01 1 09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara</b>	<b>12 Jenis</b>	<b>0</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>0,00%</b>	<b>6 Jenis</b>	<b>6 Jenis</b>	<b>50,00%</b>
5 07 01 1 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	92 Unit	6 Unit	6 Unit	100,00%	6 Unit	6 Unit	50,00%
5 07 01 1 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	103 Unit	26 Unit	26 Unit	100,00%	23 Unit	23 Unit	50,00%

Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Provinsi Riau | 2026

Perangkat Daerah : BADAN PENGHUBUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Penghubung Tahun 2025-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target Program dan Kegiatan (Renja Badan Penghubung Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Badan Penghubung Tahun 2024	Realisasi Renja Badan Penghubung Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 07 01 1 09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	48 Unit	0	0	0	0,00%	24 Unit	24 Unit	50,00%
5 07 01 1 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	325 Unit	440 unit	145 Unit	145 Unit	100,00%	160 Unit	160 Unit	50,00%
5 07 01 1 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	18 Unit	27 Unit	9 Unit	9 Unit	100,00%	9 Unit	9 Unit	50,00%
5 07 01 1 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0,00%	1 Unit	1 Unit	50,00%
5 07 02	<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>									
5 07 02 1 01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Jenis layanan terhadap stakeholder	246 Jenis	0	3 Jenis	3 Jenis	100,00%	121 Jenis	121 Jenis	50,00%
		Jumlah Fasilitas Promosi/Event yang diselenggarakan	22 Kali	0	1 Jenis	1 Jenis	0,00%	11 Kali	11 Kali	50,00%
5 07 02 1 01 01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yang ditingkatkan	16 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	8 Laporan	8 Laporan	50,00%
5 07 02 1 01 02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah laporan hasil pelayanan kelembagaan aparatur dan masyarakat	8 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	4 Laporan	4 Laporan	50,00%
5 07 02 1 01 03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah laporan hasil promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya yang ditingkatkan	8 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	4 Laporan	4 Laporan	50,00%
5 07 02 1 01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung	8 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	4 Laporan	4 Laporan	50,00%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi program dan kegiatan/sub kegiatan tahun 2025 sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
  - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu keseluruhan program/kegiatan tahun 2024 tercapai, terkecuali Sub Kegiatan – Sub Kegiatan yang disebutkan pada poin 1 (satu), untuk Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak jadi dilakasakan dikarenakan adanya pemotongan anggaran.
3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : tidak ada
4. Faktor penyebab tercapainya target kinerja program/kegiatan tersebut adalah :
  - Pelaksanaan program/kegiatan sesuai jadwal;
  - Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan;
  - Adanya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu akan mempengaruhi capaian indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra Badan Penghubung Provinsi Riau.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.  
Meskipun realisasi program dan kegiatan sudah mencapai target, namun hal-hal berikut perlu dilakukan :

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan secara berkala
- b. Inovasi dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran pada sub bidang/sub bagian, menciptakan hal-hal baru tidak hanya mencontoh kegiatan tahun sebelumnya.
- c. Pengelolaan data yang baik, sehingga kegiatan perencanaan akan selalu didukung dan berdasarkan data yang akurat.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Riau**

### **2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Riau, Badan Penghubung merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.

Pada pelaksanaan tugas tersebut, Badan Penghubung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pada Sub bagian Tata Usaha, Sub Bidang Hubungan antar Lembaga, Sub Bidang Humas dan Protokol dan Sub Bidang Pengelola Anjungan Riau.
- b. Pelaksanaan tugas teknis pada Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bidang Hubungan antar Lembaga, Sub Bidang Humas dan Protokol dan Sub Bidang Pengelola Anjungan Riau.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bidang Hubungan antar Lembaga, Sub Bidang Humas dan Protokol dan Sub Bidang Pengelola Anjungan Riau.

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah pada Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bidang Hubungan antar Lembaga, Sub Bidang Humas dan Protokol dan Sub Bidang Pengelola Anjungan Riau.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mengukur keberhasilan atau capaian kinerja pelayanan, Badan Penghubung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, sehingga dapat diketahui sejauh mana keberhasilan dan pencapaian kinerja Badan Penghubung selama waktu tertentu, Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Riau pada tahun 2024 adalah Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung terhadap Stakeholder.

Capaian kinerja pelayanan Badan Penghubung Provinsi Riau tahun 2024 melalui capaian Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan didalam Renstra Badan Penghubung Tahun 2025 - 2026 dan untuk target capaian kinerja pelayanan Badan Penghubung Provinsi Riau tahun 2025 telah ditetapkan didalam Renstra Badan Penghubung Tahun 2025-2026 pada Tabel 2.2 berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG**  
**PROVINSI RIAU**

No.	Indikator	Target Renstra PD		Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
		2025	2026	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung terhadap Stakeholder	85	85,5	85	85,5	
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	68	-	68	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Riau tahun 2025 triwulan III telah tercapai dengan nilai 85. Indikator Kinerja Utama ini mengacu pada dokumen Renstra Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026.

### **2.2.2 Data-data Perkembangan Kegiatan**

Beberapa kegiatan pada Badan Penghubung Provinsi Riau terkait dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

Salah satu aset Pemda Riau yang pemeliharaannya dilaksanakan oleh Badan Penghubung adalah Asrama Mahasiswa Riau yang terletak di Jakarta dan Pulau Jawa. Kondisi Asrama Mahasiswa Riau tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

**Tabel 2.3**  
**Kondisi Asrama Mahasiswa Riau**

<b>NO</b>	<b>ASRAMA MAHASISWA</b>	<b>LOKASI</b>	<b>LUAS LANTAI (M2)</b>	<b>KONDISI</b>	<b>JUMLAH KAMAR</b>
1	Asrama Putra -Putri	Jakarta Selatan	3.757	Kurang Baik	Putra : 14 Putri : 14
2	Asrama Putra -Putri	Bogor	3000	Baik	Putra : 8 Putri : 20
3	Asrama Putri	Yogyakarta	853	Baik	23
4	Asrama Putra	Yogyakarta	1.147	Baik	32
5	Asrama Putra	Malang	463	Baik	11

- 2) Kegiatan Fasilitasi Lembaga Masyarakat dan Lembaga Mahasiswa. Terdapat 9 (sembilan) lembaga/ organisasi masyarakat dan mahasiswa yang difasilitasi, yaitu :

- a. Organisasi Masyarakat
  - Persatuan Masyarakat Riau Jakarta (PMRJ)
  - Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Perwakilan Provinsi Riau
- b. Organisasi Mahasiswa
  - Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Riau (Hipemari), Jakarta
  - Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Riau (IKPMR), Bogor
  - Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Riau (IKPMR), Malang
  - Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Riau (IKPMR), Solo
  - Forum Mahasiswa Pasca Sarjana Riau (Fompasri), Bogor
  - Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta (IPR-Y)
  - Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau Bandung (IPMRB)

3) Kegiatan di Anjungan Riau

Anjungan Riau melaksanakan fungsi fasilitasi dan pelestarian seni budaya. Event dan pagelaran seni budaya yang sudah difasilitasi pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- Silaturahmi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Masyarakat Riau di Jakarta;
- Pengkuhan/ Pelantikan Pengurus PERSATUAN MASYARAKAT RIAU INDONESIA (PMRI)

Belum banyak event yang dilaksanakan karena masih belum berjalannya APBD Provinsi Riau secara Optimal.

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Riau**

### **2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan Badan Penghubung Provinsi Riau dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan**

Dalam meningkatkan kinerja pelayanan Badan Penghubung

Provinsi Riau memiliki indikator kinerja yang harus dicapai yaitu Indeks Kepuasan Stakeholder, untuk mencapai indikator tersebut didukung oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Riau apabila diukur secara kuantitas program dan kegiatan/sub kegiatan telah mencapai target kinerja, namun secara kualitas masih perlu ditingkatkan.

Sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat, isu strategis yang berkembang dan aktual terkait dengan tugas dan fungsi serta urusan pemerintahan daerah pada Badan Penghubung Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Perpindahan ibukota membuat Badan Penghubung harus menyesuaikan kembali peran dan fungsinya sebagai perwakilan daerah di pusat. Hal ini memungkinkan terjadinya perubahan jenis dan jumlah pelayanan yang bisa diberikan serta menuntut kualitas dan kompetensi pegawai yang lebih baik. Selain itu perpindahan ibukota sangat berpengaruh pada rencana anggaran yang diperlukan untuk perpindahan pegawai serta penyediaan fasilitas sarana prasarana di IKN seperti gedung kantor, rumah dinas, kendaraan dinas serta peralatan kantor dan rumah tangga lainnya.

Di sisi lain, Jakarta rencananya akan menjadi pusat bisnis. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi Badan Penghubung Provinsi Riau tentang posisinya di Kota Jakarta. Keberadaan Jakarta sebagai pusat bisnis harus bisa dimanfaatkan oleh Badan Penghubung dengan melakukan fasilitasi promosi secara lebih maksimal. Sehingga SDM dan sarana prasarana yang

mendukung aktifitas fasilitasi promosi baik seni budaya, pariwisata, produk unggulan maupun potensi daerah perlu menjadi perhatian bagi Badan Penghubung Provinsi Riau.

2. Pengarusutamaan gender (PUG) dan penghormatan terhadap penyandang disabilitas.

Pengarusutamaan gender (PUG) dan penghargaan atau pelayanan yang setara terhadap penyandang disabilitas adalah isu penting yang harus diperhatikan oleh Badan Penghubung Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan. Setiap orang harus dipastikan untuk bisa menerima pelayanan yang sama tanpa membedakan gendernya maupun kondisinya.

### **2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Penghubung**

Dalam upaya mencapai target kinerja, Badan Penghubung Provinsi Riau tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Penghubung adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah sarana dan prasarana tidak memadai.

Peningkatan sarana dan prasarana telah menjadi kebijakan pada Renstra 2025 - 2026, namun pada pelaksanaannya belanja modal belum disusun secara optimal untuk dapat memberi pengaruh pada peningkatan kinerja. Badan Penghubung Provinsi Riau saat ini mengelola 2.607 unit barang milik daerah. Nilai tersebut bisa dipandang besar, namun sebagian besar masih digunakan untuk operasional internal kantor, belum digunakan secara tepat untuk melakukan pelayanan pada stakeholder. Pengelolaan pemanfaatan BMD yang baik perlu ditingkatkan, dimana aset yang ada diposisikan secara efektif dan maksimal untuk bisa digunakan memberikan pelayanan, dan juga perlu adanya pengadaan sarana prasarana baru untuk dapat meningkatkan

kapasitas pelayanan yang bisa diberikan. Sebagai contoh bahwa saat ini terdapat beberapa kendaraan dinas yang kondisinya kurang baik, sudah dilakukan penilaian dan rencana selanjutnya akan dilakukan pelelangan. Sehingga untuk dapat mempertahankan bahkan meningkatkan jumlah pelayanan perlu adanya pengadaan kendaraan dinas baru. Pengadaan sarana prasarana baru harus mempertimbangkan adanya pengarusutamaan gender (PUG) dan penghargaan pada penyandang disabilitas.

2) Kualitas sarana prasarana yang tersedia kurang baik.

Sebagian dari sarana prasarana yang digunakan untuk memberikan pelayanan pada stakeholder kondisinya kurang baik. Selain kendaraan dinas sebagaimana disebutkan pada point 1, contoh lainnya adalah bangunan mess Pemda yang kondisinya memprihatinkan. Sejak adanya rencana pembangunan ulang tahun 2012, pemeliharaan mess Pemda tidak dilakukan secara optimal. Badan Penghubung perlu memperhitungkan target tamu dan penerimaan yang realistis untuk mengimbangi besaran pembiayaan perawatan terhadap mess sekaligus mengantisipasi rencana pembangunan ulang. Hal yang sama juga terjadi pada sarana prasarana berupa peralatan kantor dan rumah tangga yang kondisinya kurang dan memerlukan perawatan rutin secara maksimal. Seperti halnya pengadaan sarana prasarana baru, perawatan sarana prasarana juga harus mempertimbangkan adanya PUG dan penghargaan pada penyandang disabilitas.

3) Kualitas dan kompetensi pegawai kurang baik.

Salah satu kebijakan yang disusun pada Renstra 2025 - 2026 adalah peningkatan kualitas SDM, namun belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari minimnya jumlah diklat/seminar/bimtek/sertifikasi yang diikuti oleh pegawai Badan Penghubung Provinsi Riau. Kualitas dan kompetensi pegawai menjadi lebih mendesak dalam kondisi dimana ada

rencana pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta ke Ibukota Negara Nusantara (IKN). Badan penghubung Provinsi Riau perlu mempersiapkan diri terhadap perubahan tugas dan fungsi yang semakin berkembang dengan perpindahan ibukota tersebut. Belum lagi ditambah bahwa regulasi begitu cepat berubah, yang menuntut kualitas dan kompetensi pegawai harus semakin meningkat.

4) Standar pelayanan belum tersedia secara cukup.

Penyusunan standar pelayanan untuk melaksanakan tugas dan fungsi telah menjadi kebijakan pada Renstra 2025 - 2026, namun belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini tercermin salah satunya adalah bahwa belum ada standar yang jelas terhadap urusan kelembagaan yang diperhitungkan menjadi kinerja. Subbidang Hubungan Antar Lembaga sebagai penanggungjawab urusan kelembagaan melakukan perhitungan kinerja dengan menghitung jumlah perjalanan dinas yang dilakukan. Kondisi tersebut tidak menggambarkan jumlah urusan yang berhasil difasilitasi. Kondisi yang sama juga terjadi pada Subbidang Pengelola Anjungan Riau dalam melakukan pelayanan di Anjungan, Subbidang Humpro dalam melakukan pelayanan kehumasan dan Subbagian Tata Usaha dalam melakukan pelayanan di mess Pemda Riau. Standar pelayanan menjadi hal penting dalam melakukan pengukuran kinerja. Standar pelayanan dapat berupa Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Kepala Badan maupun bentuk surat lainnya.

5) Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal.

Dalam melaksanakan pelayanan pada stakeholder, Badan Penghubung masih banyak menggunakan metode tradisional, belum memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara optimal. Salah satunya contohnya adalah pembayaran sewa gedung di Anjungan dan pengukuran kepuasan yang masih menggunakan form secara manual.

### **2.3.3 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)**

Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan Badan Penghubung Provinsi Riau adalah tidak tercapainya Misi Kepala Daerah yang ke lima yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi”. yang bertujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”.

### **2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Riau**

Dalam meningkatkan kinerja pelayanannya, Badan Penghubung menghadapi tantangan dan memiliki peluang sebagai berikut :

#### **Tantangan :**

- 1) Belum adanya kesamaan pemahaman antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota terhadap tugas dan fungsi Badan Penghubung.

#### **Peluang :**

- 1) Tersedianya potensi sumber daya aparatur, yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan meningkatkan kompetensinya agar dapat berperan optimal dalam peningkatan kinerja.
- 2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kinerja.

### **2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan**

Beberapa isu-isu penting yang dapat direkomendasikan sebagai catatan strategis untuk dirumuskan pada program dan kegiatan prioritas untuk tahun 2026 adalah :

1. Kurang nya alokasi anggaran untuk kegiatan urusan pada Badan Penghubung tahun 2026
2. Kapasitas dan kualitas pegawai belum memadai.
3. Pemeliharaan gedung asrama mahasiswa yang kondisi kerusakannya sudah berat.
4. Penyediaan Fasilitas yang mendukung Pengarustamaan gender pada gedung kantor dan asrama – asrama mahasiswa.

Berdasarkan isu-isu tersebut, Badan Penghubung Provinsi Riau dipandang perlu untuk meningkatkan pagu anggaran pada program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada rencana kerja tahun 2026 yaitu :

1. Program Pelayanan Penghubung  
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat.
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penjelasan mengenai analisa kebutuhan rencana kerja perangkat daerah tersebut dilakukan apabila adanya temuan-temuan rencana kerja perangkat daerah yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

Kondisi yang ditemukan pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan membandingkannya dengan analisis kebutuhan Badan Penghubung Provinsi Riau dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Antara Rancangan Awal RKPD dan analisis kebutuhan tidak terdapat usulan kegiatan baru
  
- 2) Pagu anggaran per sub kegiatan yang terdapat pada Rancangan Awal RKPD belum sesuai dan dilakukan peyesuaian dengan analisis kebutuhan dengan tetap menyesuaikan jumlah total pagu yang telah diatur pada Surat Edaran Gubernur Riau tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 disajikan dalam format T-C. 31 pada Tabel 2.4 berikut ini :

**TABEL 2.4**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026**  
**PROVINSI RIAU**

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGHUBUNG

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMELIHARAAN				27.081.141.561,75	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMELIHARAAN				19.615.693.980,00	
	PENGELOLAAN PENGHUBUNG				27.081.141.561,75	PENGELOLAAN PENGHUBUNG				19.615.693.980,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				23.776.141.561,75	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				18.688.540.973,00	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				260.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				60.249.395,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	260.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	60.249.395,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.885.141.561,75	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.430.428.972,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/ Bulan	10.885.141.561,75	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/ Bulan	11.430.428.972,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				50.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.000.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jakarta	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	50.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jakarta	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	25.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				150.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				65.830.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jakarta	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	68 Paket	90.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jakarta	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	82 Paket	60.830.000,00	

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGHUBUNG

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	60.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	5.000.000,00	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>2.330.000.000,00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.301.720.309,00</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	70.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	55.299.720,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	160.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	100.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	85.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	54.797.600,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	450.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	292.822.362,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	100.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	44.737.227,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	250.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	200.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.150.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	530.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	65.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	24.063.400,00	

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGHUBUNG

NO	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>1.220.000.000,00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>87.500.000,00</b>	
	Pengadaan Mebel	Jakarta	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	570.000.000,00	Pengadaan Mebel	Jakarta	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	56 Unit	550.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	25.000.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	100.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	32.500.000,00	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>3.236.000.000,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>4.238.165.092,00</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	16.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	16.000.000,00	
	Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	670.000.000,00	Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	654.904.500,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.550.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.567.260.592,00	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>5.645.000.000,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>1.479.647.205,00</b>	

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGHUBUNG

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jakarta	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	750.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jakarta	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	472.617.205,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	1.275.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	688.060.000,00	
	Pemeliharaan Mebel	Jakarta	Jumlah Mebel yang Dipelihara	24 Unit	60.000.000,00	Pemeliharaan Mebel	Jakarta	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	25.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	165 Unit	160.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jakarta	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	65.200.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	3.200.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	203.770.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>					<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>					
	<b>Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</b>				<b>3.305.000.000,00</b>	<b>Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</b>				<b>927.153.007,00</b>	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	8 Laporan	1.180.000.000,00	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	8 Laporan	201.115.721,00	

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGHUBUNG

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan	975.000.000,00	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan	410.845.592,00	
	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	4 Laporan	950.000.000,00	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	4 Laporan	257.900.224,00	
	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	4 Laporan	200.000.000,00	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	4 Laporan	57.291.470,00	

Berdasarkan tabel Review Terhadap Ranwal RKPD diatas dapat dilihat bahwa sub kegiatan Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026 yang memiliki perbedaan pagu anggaran dengan yang tertera pada Ranwal RKPD dan tidak sesuai dengan kebutuhan Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026. Hal ini di karenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran terkait penyelesaian kewajiban tunda bayar dan tunda salur ke Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada Forum Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan, tidak terdapat usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Badan Penghubung Provisi Riau dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota.

**Tabel 2.5**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Provinsi Riau**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan nasional terkait dengan urusan pemerintahan daerah, tugas dan fungsi pada Badan Penghubung Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

- Proyek strategis nasional (PSN)

Adanya PSN yang dilaksanakan di Provinsi Riau dan peluang proyek nasional lainnya menjadikan peran dan fungsi Badan Penghubung sebagai perwakilan daerah di pusat menjadi semakin vital. Badan Penghubung dapat melakukan fasilitasi yang lebih intensif kepada Kementerian terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam kaitannya tentang pembangunan jalan tol lintas sumatera.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penghubung Provinsi Riau**

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026, tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a) Tujuan :

Meningkatkan kualitas pelayanan Badan Penghubung

- b) Sasaran :

Meningkatkan kapasitas pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder

Rumusan tujuan dan sasaran Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026 disajikan pada tabel 3.1 berikut :

**Tabel 3.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGHUBUNG**  
**PROVINSI RIAU TAHUN 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Badan Penghubung	1. Meningkatnya pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder.	1. Indeks kepuasan pelayanan Badan Penghubung terhadap stakeholder	85,5
		2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan Badan Penghubung terhadap rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan pada Renja tahun 2026 adalah :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
2. Hasil kesepakatan para pemangku kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah

Pada Renja Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026 terdapat 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 21.960.301.591,- (Dua puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh

juta tiga ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).  
Program dan kegiatan/sub kegiatan adalah sebagai berikut :

**I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
PROVINSI**

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
  - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
  - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
  - 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  - 1) Pengadaan Mebel
  - 2) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
  - 3) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
7. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
  - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - 3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
8. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3) Pemeliharaan Mebel
  - 4) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - 5) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
  - 6) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

## **II. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**

### **1. Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**

- 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
- 2) Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat
- 3) Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
- 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.

Rumusan rencana program dan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Riau tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 disajikan berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD dengan beberapa catatan dalam pembahasan tersebut yaitu :

- a. Pemindahan Seluruh belanja ATK, tinta, kertas dan cetak penggandaan ke Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor di Sub Bagian TU.
- b. Tambahan belanja Cetak Laporan di setiap Sub kegiatan pada kegiatan urusan di Sub Bidang untuk pembuatan Laporan Akhir kegiatan.
- c. Tidak ada penambahan anggaran sesuai intruksi Bappeda dan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Riau.

Sehingga data yg dapat disampaikan dengan format T-C.33 pada tabel 3.2 sebagai berikut ini :

Tabel 3.2  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH 2026  
 DAN PRAKIRAAN MAJU 2027  
 PROVINSI RIAU**

Perangkat Daerah : BADAN PENGHUBUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH								
5	07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG				19.615.693.980				27.855.428.972
5	07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	18.688.540.973			100%	26.835.428.972
5	07 01 1 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		7 Dok	60.249.395			7 Dok	260.000.000
5	07 01 1 01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jakarta	7 Dok	60.249.395	APBD		7 Dok	260.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
5	07	01	1	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>11.430.428.972</b>			<b>1 Laporan</b>	<b>12.574.428.972</b>
5	07	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jakarta	82 Orang/Bulan	11.430.428.972	Dana Alokasi Umum /APBN		82 Orang/Bulan	12.574.428.972
5	07	01	1	03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola</b>		<b>2 Laporan</b>	<b>25.000.000</b>			<b>2 Laporan</b>	<b>50.000.000</b>
5	07	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jakarta	2 Laporan	25.000.000	APBD		2 Laporan	50.000.000
5	07	01	1	05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Layanan Administrasi Kepegawaian yang dikelola</b>		<b>2 Jenis</b>	<b>65.830.000</b>			<b>2 Jenis</b>	<b>150.000.000</b>
5	07	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jakarta	82 Paket	60.830.000	APBD		82 Paket	90.000.000
5	07	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jakarta	1 Orang	5.000.000	APBD		1 Orang	60.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	07	01	1	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi</b>		<b>8 Jenis</b>	<b>1.301.720.309</b>		<b>8 Jenis</b>	<b>2.330.000.000</b>
5	07	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jakarta	3 Paket	55.299.720	APBD	3 Paket	70.000.000
5	07	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jakarta	4 Paket	100.000.000	APBD	4 Paket	160.000.000
5	07	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jakarta	4 Paket	54.797.600	APBD	4 Paket	85.000.000
5	07	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jakarta	5 Paket	292.822.362	APBD	5 Paket	450.000.000
5	07	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jakarta	3 Paket	44.737.227	APBD	3 Paket	100.000.000
5	07	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Jakarta	1 Laporan	200.000.000	APBD	1 Laporan	250.000.000
5	07	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta	1 Laporan	530.000.000	APBD	1 Laporan	1.150.000.000
5	07	01	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jakarta	2 Dok	24.063.400	APBD	2 Dok	65.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	07	01	1	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		3 Jenis	87.500.000			3 Jenis	1.220.000.000
5	07	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jakarta	1 Paket	30.000.000	APBD	5 Paket	570.000.000
5	07	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jakarta	5 Unit	25.000.000	APBD	20 Unit	550.000.000
5	07	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jakarta	1 Unit	32.500.000	APBD	5 Unit	100.000.000
5	07	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi		3 Jenis	4.238.165.092		3 Jenis	4.606.000.000
5	07	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jakarta	1 Laporan	16.000.000	APBD	1 Laporan	16.000.000
5	07	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jakarta	1 Laporan	654.904.500	APBD	1 Laporan	670.000.000
5	07	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jakarta	1 Laporan	3.567.260.592	APBD	1 Laporan	3.920.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	07	01	1	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara		6 Jenis	1.479.647.205			6 Jenis	5.645.000.000
5	07	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jakarta	6 Unit	472.617.205	APBD	6 Unit	750.000.000
5	07	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jakarta	23 Unit	688.060.000	APBD	23 Unit	1.275.000.000
5	07	01	1	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jakarta	8 Unit	25.000.000	APBD	24 Unit	60.000.000
5	07	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jakarta	80 Unit	65.200.000	APBD	165 Unit	160.000.000
5	07	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Jakarta	2 Unit	203.770.000	APBD	9 Unit	3.200.000.000
5	07	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Jakarta	1 Unit	25.000.000	APBD	1 Unit	200.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	07	02				<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>			<b>100%</b>	<b>927.153.007</b>				<b>1.020.000.000</b>
5	07	02	1	01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Jenis layanan terhadap stakeholder		125 Jenis	669.252.783			125 Jenis	2.355.000.000
							Jumlah Fasilitas Promosi/Event yang diselenggarakan		11 Kali	257.900.224			11 Kali	950.000.000
5	07	02	1	01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yang ditingkatkan	Jakarta	8 Laporan	201.115.721	APBD		8 Laporan	1.180.000.000
5	07	02	1	01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah laporan hasil pelayanan kelembagaan aparatur dan masyarakat	Jakarta	4 Laporan	410.845.592	APBD		4 Laporan	975.000.000
5	07	02	1	01	03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah laporan hasil promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya yang ditingkatkan	Jakarta	4 Laporan	257.900.224	APBD		4 Laporan	950.000.000
5	07	02	1	01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung	Jakarta	4 Laporan	57.291.470	APBD		4 Laporan	200.000.000

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU**

Dokumen Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Riau merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Riau serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, indikator dan target capaian serta pagu indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Riau.

Dana pada program dan kegiatan/sub kegiatan Badan Penghubung Provinsi Riau yang tertuang dalam Renja Tahun 2026 bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau sebagaimana yang terlihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU  
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN PENGHUBUNG						21.960.301.591,00								29.078.000.000,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						21.960.301.591,00							29.078.000.000,00		
	5.07	PENGLOLAAN PENGHUBUNG						21.960.301.591,00							29.078.000.000,00		
1.	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Badan Penghubung</i>	-			100 Persen	20.692.143.409,00						-	25.773.000.000,00		
		[ Terpenuhiya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran ]	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	100	100	100	100	20.692.143.409,00	-	-	-	-	-	-	25.773.000.000,00	-	
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen</i>	-			7 Dokumen	78.270.243,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA	ASN pada Badan Penghubung	-	260.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG	
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				7 Dokumen	78.270.243,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA	ASN pada Badan Penghubung		260.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	-			1 Laporan	11.743.617.972,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA	ASN dan PPPK pada Badan Penghubung	-	11.600.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				82 Orang/ Bulan	11.743.617.972,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA	ASN dan PPPK pada Badan Penghubung		11.600.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	-			2 Laporan	33.862.816,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA	ASN, Masyarakat, Mahasiswa dan Stakeholder Badan Penghubung lainnya	-	50.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	33.862.816,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA	ASN, Masyarakat, Mahasiswa dan Stakeholder Badan Penghubung lainnya		50.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
		-	-	-	-	-	-	20.692.143.409,00	-	-	-	-	-	-	25.773.000.000,00	-
5.07.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Jenis layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi</i>	-			2 jenis	48.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA	ASN dan PPPK pada Badan Penghubung	-	60.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
5.07.01.1.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				15 Orang	48.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA	ASN dan PPPK pada Badan Penghubung		60.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
		[ Terpenuhiya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran ]	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	20.692.143.409,00	-	-	-	-	-	-	25.773.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	-			8 jenis	1.646.701.386,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA	ASN, Masyarakat, Mahasiswa dan Stakeholder Badan Penghubung lainnya	-	2.330.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	55.299.364,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA	ASN, Masyarakat, Mahasiswa dan Stakeholder Badan Penghubung lainnya		70.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	136.245.985,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA	ASN, Masyarakat, Mahasiswa dan Stakeholder Badan Penghubung lainnya		160.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				2 Paket	54.797.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA	ASN, Masyarakat, Mahasiswa dan Stakeholder Badan Penghubung lainnya		85.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
5.07.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	336.162.948,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA	ASN, Masyarakat, Mahasiswa dan Stakeholder Badan Penghubung lainnya		450.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
5.07.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	45.804.089,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA	ASN, Masyarakat, Mahasiswa dan Stakeholder Badan Penghubung lainnya		100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
5.07.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	TRANSFO RMASI TATA KELOLA	ASN, Masyarakat, Mahasiswa dan Stakeholder Badan Penghubung lainnya		250.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
5.07.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	743.948.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	TRANSFO RMASI TATA KELOLA	ASN, Masyarakat, Mahasiswa dan Stakeholder Badan Penghubung lainnya		1.150.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
5.07.01.1.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				2 Dokumen	24.443.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	TRANSFO RMASI TATA KELOLA	ASN, Masyarakat, Mahasiswa dan Stakeholder Badan Penghubung lainnya		65.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari Renstra Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2025-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026.

Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Penghubung dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### **A. Catatan Penting**

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Badan Penghubung Tahun 2026 antara lain :

- Rencana Kerja Badan Penghubung disusun dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD.
- Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.
- Penyusunan Renja Badan Penghubung ini berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Riau tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.
- Badan Penghubung provinsi Riau berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan melengkapi sarana dan prasarana yang responsif gender dan disabilitas.

#### **B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Badan Penghubung tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Renja Badan Penghubung ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan

berdasarkan hasil review dan hasil pembahasan bersama DPRD Provinsi Riau

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Penghubung Tahun 2026.


C. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Badan Penghubung Tahun 2026 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Tahun 2026 secara berkala setiap triwulannya.

Terkait dengan teknis pelaksanaannya, Badan Penghubung Provinsi Riau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya senantiasa bekerja bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder yang diimplementasikan dalam bentuk target kinerja dan realisasi sesuai aturan yang berlaku.

Jakarta, 28 November 2025

**KEPALA BADAN ENGHUBUNG  
PROVINSI RIAU**



**RIDHO ADRIANSYAH, S.STP**  
**Pembina Tk. I / IV.b**  
**NIP. 19830914 200112 1 005**

## Formulir E.29

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan  
Renja Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi	
		Ada	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi.	V	
2	Pengolahan data dan informasi.	V	
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah provinsi.	V	
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra-Perangkat Daerah provinsi.	V	
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	V	
6	Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi.	V	
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	V	
8	Penelaahan usulan masyarakat.	V	
9	Perumusan kegiatan prioritas.	V	
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi.	V	
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.	V	
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	V	
10.a	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	V	
10.b	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur.	V	
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	V	
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah	V	
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V	
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disahkan.	V	

**Kepala Badan Penghubung  
Provinsi Riau**



**Ridho Adriansyah, S.STP  
NIP. 198309142001121005**



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## BADAN PENGHUBUNG

Jln. Otto Iskandardinata No.107 Jakarta Timur 13330  
Telp : 021-8194174 Fax : 021-8198330 Website : [www.badanpenghubung.riau.go.id](http://www.badanpenghubung.riau.go.id)  
E-mail : [badanpenghubungprovinsiriau@gmail.com](mailto:badanpenghubungprovinsiriau@gmail.com)

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU NOMOR : Kpts. 09 /BP3R/V/2025

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU TAHUN 2025

#### KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 125 sampai dengan Pasal 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 82);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026;
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan Pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta melakukan evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya;
  2. Melakukan koordinasi dan penelaakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan Dokumen Kebijakan Lainnya;

3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Pusat dan instansi terkait lainnya;
4. Menyusun agenda kerja Penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Penghubung Tahun 2024;
5. Melakukan analisis dan pengkajian hasil evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya, untuk penentuan isu-isu strategis, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah;
6. Perumusan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai target kinerja dan pendanaan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
7. Terlibat secara penuh dalam pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2024.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebebankan kepada APBD Provinsi Riau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Mei 2025

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
PROVINSI RIAU**



**RIDHO ADRIANSYAH, S.STP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19830914 200112 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENGHUBUNG PROVINSI RIAU  
Nomor : Kpts.09/BP3R/V/2025  
Tanggal : 5 Mei 2025

**TIM PENYUSUN**  
**RENCANA KERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU TAHUN 2026 DAN**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU**  
**TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL</b>
1	Penanggung Jawab	Ridho Adriansyah, S.STP	Kepala Badan
2	Ketua	Decy, S.STP	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3	Anggota	Boy Surya, SE, M.Si	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga
4	Anggota	R. Yusmai Riswan, S.AP	Kepala Sub Bidang Humas dan Protokol
5	Anggota	Nadia Sarinur, S.Sos	Plt. Kepala Sub Bidang Pengelola Anjungan Riau
6	Anggota	Bambang Adhi Nughroho, SE	Fungsional Perencana Muda
7	Anggota	Redy Ariesna, S.E	Fungsional Perencana Pertama
8	Anggota	Yulia Tetra, S.KM	Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bidang Tata Usaha
9	Anggota	Rina Indraini, S.Si	Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bidang Tata Usaha
10	Anggota	Evy Safitri, S.Kom	Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bidang Tata Usaha
11	Anggota	Hari Hamid, S.T	Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bidang Tata Usaha
12	Anggota	M. Sandy Wibowo, S.Kom	Operator Komputer

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
PROVINSI RIAU**



**RIDHO ADRIANSYAH, S.STP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19830914 200112 1 005



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
INSPEKTORAT DAERAH**

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256

**PEKANBARU**

**CATATAN HASIL REVIU  
RANCANGAN AKHIR RENJA-PD  
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU  
TAHUN 2026**



PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
**INSPEKTORAT DAERAH**

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256  
email : [inspektorat@riau.go.id](mailto:inspektorat@riau.go.id) website : [inspktorat.riau.go.id](http://inspktorat.riau.go.id)  
**PEKANBARU**



<b>INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU</b>	Disusun oleh	Alfira, A.Md
	Tanggal	25 November 2025
	Direviu oleh	Aulia Osna R, SH, MH
	Tanggal	25 November 2025
	Disetujui oleh	Roni Cokro S, SE, M.Si
	Tanggal	25 November 2025

**CATATAN HASIL REVIU**

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD)  
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU TAHUN 2026**

<b>Uraian Catatan Hasil Reviu</b>	<b>No Indeks KKR</b>
<b>A. Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)</b>	KKR 01
Penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026 <b>belum sepenuhnya</b> didukung dengan dokumen pendukung yang memadai.	
<b>B. Pengujian atas Kesesuaian Sistematika Penulisan dan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)</b>	KKR 02
Penyajian sistematika penulisan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026 <b>telah sepenuhnya</b> mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Plt. Kepala Bappeda Provinsi Riau Nomor 000.7/136/BAPPEDA-BIDANG I/2025 tanggal 29 Oktober 2025.	
<b>C. Pengujian Atas Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan RKPD</b>	KKR 03
Rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026 pada Bab III <b>belum sepenuhnya</b> selaras dengan rumusan tujuan dan sasaran pada Bab IV Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, dimana <b>masih terdapat</b> rumusan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2026 yang <b>belum disajikan</b> dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026.	

<b>D. Pengujian Atas Penyusunan Subtansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) meliputi :</b>	
<b>1. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada BAB III Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Didasarkan pada Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada BAB II Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)</b>	KKR 04.a
Penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026 <b>telah selaras</b> dan didasari atas isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Riau.	
<b>2. Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)</b>	KKR 04.b
Penetapan indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026 <b>telah selaras</b> dan mendukung indikator kinerja program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026.	
<b>3. Keselarasan Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renstra-PD, RKPD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)</b>	KKR 04.c
Penyajian rumusan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026 <b>telah selaras</b> dengan Renstra-PD dan RKPD Tahun 2026.	
<b>4. Keselarasan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat dalam Renstra-PD, RKPD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)</b>	KKR 04.d
Penyajian rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026 <b>telah selaras</b> dengan Renstra-PD dan RKPD Tahun 2026.	
<b>5. Keselarasan Pagu Renstra-PD, RKPD 2026 dengan Pagu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)</b>	KKR 04.e
Penyajian pagu program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026 <b>belum diselaraskan</b> dengan pagu RKPD Tahun 2026.	
<b>6. Keselarasan Indikator Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renstra-PD dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)</b>	KKR 04.f

<p>Penyajian indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026 <b>belum sepenuhnya</b> mempedomani indikator target pada Renstra-PD.</p>	
<p><b>HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN</b></p>	
<p><b>SARAN</b></p>	
<p>Berdasarkan hasil reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026, kami memberikan saran kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau melalui Tim Penyusun Rancangan Akhir Renja-PD Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026 agar :</p>	
<p>1. Melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Riau untuk mendapatkan dokumen pendukung dalam melaksanakan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026.</p>	
<p>2. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan penyajian pada Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026 dengan menggunakan data hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 dari Bappeda Provinsi Riau.</p>	
<p>3. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan penyajian pada rumusan tujuan dan sasaran dan rumusan indikator kinerja tujuan dan sasaran pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026.</p>	
<p>4. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan penyajian pagu program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Penghubung Provinsi Riau Tahun 2026 dengan mempedomani pagu yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026 dan Surat Gubernur Riau Nomor 000.7.2.4/Bappeda-Bid I/2025/4818 untuk diinput ke dalam SIPD.</p>	
<p>5. Memperhatikan penyajian indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra-PD.</p>	
<p><b>KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU,</b></p>  <p><b>RIDHO ADRIANSYAH, S.STP</b> NIP. 19830914 200112 1 005</p>	<p>Pekanbaru, 25 November 2025 <b>PENGENDALI MUTU,</b></p>  <p><b>Drs. ARMANSYAH</b> NIP. 19631231 198303 1 309</p>

dari SIP  
✓

## TABEL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU

**TAHUN 2026**

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
<b>1.</b>	<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>			
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	V		
	1.2 Dasar Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	V		
	1.3 Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.	V		
	1.4 Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	V		
<b>2.</b>	<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024</b>			
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian	Berisikan uraian mengenai : 1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;	V		

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	Renstra Perangkat Daerah	3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan; 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut; dan 7. Sajikan <b>Tabel T-C.29</b>			
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	1. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK; 2. Sajikan <b>Tabel T-C.30</b>		V	Sesuaikan dengan ketentuan Tabel T-C.30 dan tambahkan IKU sesuai RPJMD yakni Nilai SAKIP Perangkat Daerah
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : 1. Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs ( <i>Sustainable Development Goals</i> ); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan	V		

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	2.4 Review terhadap RKPD	Berisikan uraian mengenai : 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat didalam RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan 4. Sajikan <b>Tabel T-C.31</b>	V		
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat	Berisikan uraian mengenai : 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Sajikan <b>Tabel T-C.32</b>	V		
<b>3</b>	<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>			
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Berisikan uraian mengenai : Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	V		
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : 1. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah; 2. Target Indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah pada Renja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.	V		

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Berisikan uraian mengenai : 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan; 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan; 3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program, kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dan 4. Sajikan Tabel T-C.33	V		
4	<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>			
		Berisikan uraian mengenai : Hasil inputan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada SIPD RI sesuaikan target indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan RKPD	V		
5	<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>			
		Berisikan uraian mengenai : 1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan; 3. Rencana tindak lanjut; 4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan <b>tempat</b> dan <b>tanggal</b> dokumen( tanggal terbit Pergub Renja), <b>nama Perangkat Daerah</b> dan <b>nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah</b> , serta <b>cap</b> pemerintah daerah yang bersangkutan.	V		
6	<b>LAMPIRAN</b>	1. Format pemetaan program/kegiatan/sub kegiatan renstra perangkat daerah tahun 2025-2026 dengan program/kegiatan/sub kegiatan SIPD-RI (Renja 2025)	V		

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		2. SK Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 3. BA Hasil Review Inspektorat			

Pekanbaru, November 2025

Mengetahui,

**KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA**

**RAJA JUARISMAN, ST., M.Si**  
NIP. 19770611 200012 1 002

**FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MADYA**

**RUDI HENDRA GUNAWAN**  
NIP. 19701224 199803 1 004

**FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA**

**ARI DIANUARI. ST**  
NIP. 19810103 200901 1 002

**BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU**

**KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**



**DECY, S.STP, M.Si**  
NIP. 19831214 200501 1 003

**FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA**



**BAMBANG ADHI NUGROHO, SE**  
NIP. 19831214 200501 1 003

**FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA**



**REDY ARIESNA, SE**  
NIP. 19790420 200903 1 001